

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2022/Khusus - Awal Menjabat)**

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA TEGAL
UNIT KERJA : RSUD KARDINAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUS DWI SULISTYANTONO**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **835852**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **2.100.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m²/65 m² di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 355 m²/300 m² di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **637.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
5. MOTOR, KAWASAKI SPM Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 29.000.000
6. MOTOR, YAMAHA SPM Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
7. MOTOR, YAMAHA SPM Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000
8. MOTOR, KAWASAKI KR 150 N/ NINJA SS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **14.500.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	384.560.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	280.000.000
Sub Total	Rp.	3.416.560.000
III. HUTANG	Rp.	1.300.450.517
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.116.109.483

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.